

Efisiensi Belanja Modal Pemerintah Daerah: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Cut Putri Silphia Chandra¹, Darwanis², dan Ridwan Ibrahim³

¹Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala,
Darussalam, Banda Aceh, 23374, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala
Darussalam, Banda Aceh, 23374, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Capital expenditures, DEA and, Efficiency

Abstract

Based on District/City Regional Government Financial Reports (LKPD) in Aceh, absorption of capital expenditures is still low compared to the previously set budget. In fact, the percentage of capital expenditure is very small compared to the total regional expenditure in each region. This study aims to determine the efficiency level of capital expenditures based on Data Envelopment Analysis (DEA) and Regional Financial Efficiency Ratios (RFER) in districts/cities in Aceh Province for the 2016 until 2019. Research input variables are capital expenditures and the research output variables are local revenue, investment, and economic growth. The research population is all districts/cities in Aceh province. The analytical method used is DEA with the help of DEAP software version 2.1 and RFER according to the Ministry of Home Affairs No.690,900,327 (1996). The results show that the efficiency level of capital expenditure in districts/cities in Aceh Province for the 2016-2019 period is better using the RFER calculation than using the DEA method. This study concludes that the use of capital expenditures in districts/cities in Aceh Province is quite efficient, so it is necessary to improve the quality of regional capital expenditure management that can encourage an increase in own source income, investment, and economic growth

Citation: Chandra, Cut Putri Silphia, Darwanis, dan Ibrahim, Ridwan. (2022). Efisiensi Belanja Modal Pemerintah Daerah: Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *AFRE Accounting and Financial Review*, 5(2): 222-232

Abstraks

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019, penyerapan belanja modal masih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Persentase belanja modal sangat kecil dibandingkan dengan total belanja daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja modal berdasarkan analisis Data Envelopment Analysis (DEA) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD). Variabel input penelitian adalah belanja modal dan variabel output penelitian adalah pendapatan asli daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi. Populasi penelitian yaitu seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Metode analisis yang digunakan yaitu DEA dan REKD sesuai Kep-mendagri No. 690.900.327 Tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh lebih baik menggunakan penghitungan REKD dibandingkan menggunakan metode DEA. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh pada kategori cukup efisien, sehingga diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan belanja modal daerah yang mampu mendorong peningkatan PAD, investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci:

Biaya modal, DEA dan Efisiensi

ISSN (print): 2598-7763

ISSN (online): 2598-7771

✉ Corresponding Author:

Darwanis:

Tel. /Fax. 081360874983

E-mail: darwanis.fe@unsyah.ac.id

JEL Classification: : H410; H540; H570

DOI: <https://doi.org/10.26905/afr.v5i.8037>

1. Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Jokowi Widodo. Target pemerintah adalah untuk meningkatkan pemerataan diseluruh wilayah sehingga memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah (Warsilan & Noor, 2015). Menurut Samuelson & Nordhaus (2003), produksi barang dan jasa suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu ukuran makro keberhasilan pembangunan. Sumber daya seperti modal manusia, modal alam, modal keuangan, dan modal teknologi semuanya dapat mendorong kemajuan ekonomi. Pemerintah Indonesia menggunakan skema utang untuk mendapatkan dana yang digunakan dalam perbaikan infrastruktur di Indonesia (Kementerian Keuangan RI, 2022). Belanja infrastruktur diharapkan mencapai tingkat efisiensi yang baik sehingga pembiayaan utang negara untuk investasi infrastruktur tersebut menjadi bermakna, namun demikian tingkat efisiensi anggaran infrastruktur sebelum tahun 2015 masih dianggap kurang efisien seperti yang terjadi di Kabupaten Cilacap sehingga masih terdapat kesenjangan ekonomi pada pelaku industri kecil dan rumah tangga (Wiguna & Sugiarti, 2019). Pemerintah kemudian menggunakan pembangunan infrastruktur sebagai alat utama untuk menutup kesenjangan regional yang telah berkembang sebagai respon terhadap ketimpangan ekonomi hal ini ditunjukkan dengan peningkatan anggaran infrastruktur yang sangat drastis sebesar 63,2% pada tahun 2015 (Rasyidi, 2019). Selain itu, dalam pernyataannya Presiden Jokowi menyebutkan bahwa saat ini banyak terjadi inefisiensi anggaran baik APBN maupun APBD (Widodo, 2021).

Perhatian khusus ditujukan pada wilayah yang menerima alokasi dana otonomi khusus. Pemerintah pusat telah meningkatkan alokasi belanja modal khususnya di Provinsi yang mendapatkan dana otonomi khusus seperti Aceh dan Papua (Arsa & Setiawina, 2015). Sesuai dengan persyaratan undang-undang, pemerintah daerah diberi wewenang yang cukup besar di bawah kebijakan otonomi daerah tahun 2001 untuk mengontrol dan mengelola kegiatan pemerintahan mereka sendiri dan kepentingan rakyat. Akibat dari rencana otonomi daerah, pemerintah pusat terus mengalokasikan lebih banyak dana transfer ke pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah.

Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi pemerintah karena pemerintah daerah dianggap mampu meningkatkan respon terhadap isu-isu

kebijakan daerah dan mendorong disiplin capaian pendapatan daerah (Alonso & Andrews, 2018). Namun menurut Vidoli & Fusco (2018) kebutuhan belanja, efisiensi alokasi dan biaya spasial pemerintah daerah masih menyiratkan perhitungan yang bias.

Pemerintah pusat menyumbang 25% dari Dana Transfer Umum Infrastruktur, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil, sebagai salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur daerah (DBH). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah digunakan untuk menyediakan layanan publik daripada hanya untuk membayar pegawai (Sofi, 2020).

Penelitian terkait dengan analisis efisiensi belanja pemerintah relatif masih sedikit khususnya belanja modal. Penelitian terkait dengan efisiensi belanja pemerintah daerah antara lain dilakukan oleh (Haryanto, 2013); (Nasution, 2020); (Febrianty *et al.*, 2021). Hasil penelitian Indriati (2014) menunjukkan secara rata-rata menunjukkan inefisiensi belanja daerah di Kabupaten Sumbawa. Penelitian Kristianto & Widodo (2017) menyatakan jumlah kota/kabupaten yang masih belum mencapai tingkat efisiensi sebesar 100 persen di Provinsi Jawa Timur masih lebih mendominasi. Namun disisi lain Sari *et al.* (2018) menyatakan pelaksanaan anggaran belanja Kota Samarinda pada Tahun 2011 s.d. 2015 pada kategori efisien. Penelitian Fahlevi & Ananta (2015) dan (Andriani & Setyowati, 2019) menunjukkan tingginya efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran belanja langsung di SKPD Kota Banda Aceh dan di Desa Sendangsari. Lantu *et al.* (2017) menyatakan tingkat efisiensi berada pada kategori sangat efisiensi dikarenakan pengalokasian anggaran belanja modal di tahun tertentu lebih besar dari pada 2 (dua) tahun setelahnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota di Aceh selama tahun 2017, penyerapan belanja modal masih rendah, yaitu rata-rata serapan 88,39%. Bahkan persentase penyerapan belanja modal sangat kecil dibandingkan dengan total realisasi belanja daerah pada masing-masing daerah dengan rata-rata serapan sebesar 23,81%. Persentase terendah tingkat penyerapan anggaran belanja modal dialami oleh Kabupaten Pidie dengan tingkat serapan anggaran belanja modal sebesar 71,40%. Sedangkan serapan tertinggi penyerapan anggaran belanja modal dialami oleh Kabupaten Aceh Tengah dengan tingkat serapan anggaran belanja modal sebesar 97,76%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh menyatakan, serapan belanja negara APBN 2018 di Aceh turun 0,7% jika dibandingkan semester I tahun 2017 (Firsawan, 2018). Penyebabnya, karena belum optimalnya penyerapan anggaran belanja modal dan belanja transfer ke daerah. Selain itu, terlambatnya penetapan APBDES yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar penyaluran anggaran ke desa, dan terlambatnya penyusunan laporan realisasi kepada pemerintah daerah juga merupakan kendala lain dari serapan belanja daerah.

Menurut kajian Bappenas (2011) tentang kualitas belanja daerah, kualitas belanja dan penganggaran ditentukan oleh seberapa baik proses dan hasil penyusunan APBD selaras dengan nilai ekonomi, efisiensi, efektivitas, pemerataan/kewajaran, akuntabilitas, dan daya tanggap. Belanja yang berkualitas menurut Juanda *et al.* (2013) dalam kajiannya adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan dilaksanakan secara efisien dan efektif, tepat waktu dan sesuai anggaran, terbuka dan akuntabel.

Efisiensi pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sekiguchi, 2019). Menurut Geys *et al.* (2013) ada perbedaan substansial efisiensi anggaran di seluruh kota di Jerman meskipun pengaturan kelembagaan homogen. Kotamadya yang berukuran kecil menunjukkan kurang efisien sehingga diperlukan kebijakan atau program khusus untuk meningkatkan kerja sama antar kota-kota kecil. Penelitian Ramlan (2009) melihat PAD dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel output, dan hasilnya menunjukkan bahwa hanya ada dua Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat mencapai efisiensi optimal 100 persen dan satu Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendekati. Sebaliknya, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur kurang efisien dalam hal kinerja. Hal ini terjadi karena PAD Pemerintah Kabupaten/Kota kurang optimal, tergantung dari belanja modal yang telah dikeluarkan.

Selanjutnya Putra *et al.* (2018) menganggap realisasi belanja daerah tahunan sebagai variabel input, dengan indeks pembangunan manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi LPE, penduduk miskin, dan pengangguran terbuka sebagai faktor output. Temuannya mengungkapkan bahwa belanja daerah antara tahun 2013 dan 2015 efektif dalam mencapai IPM, LPE, masyarakat miskin, dan produksi pengangguran terbuka.

Selain itu Wang & Alvi (2011) menunjukkan bahwa inefisiensi pengeluaran pemerintah menu-

run ketika dilengkapi dengan peningkatan kegiatan ekonomi swasta, khususnya peningkatan konsumsi, investasi dan ekspor. Hasil lainnya yaitu ekspansi moneter memperburuk ketidakefisienan pemerintah dalam mendorong PDB. Akhirnya, indikator CPI (*Corruption Perception Index*) menunjukkan tidak ada pengaruh kuat pada inefisiensi pemerintah di kelompok OECD (*Organization for Economic Co-Operation and Development*), yaitu suatu organisasi untuk kerjasama dan pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja modal berdasarkan analisis DEA dengan REKD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019.

2. Pengembangan Kerangka Penelitian

Menurut Mardiasmo (2009), efisiensi adalah pencapaian output yang optimal dengan penggunaan input tertentu, atau sebaliknya, penggunaan tingkat input terkecil untuk mencapai tingkat output tertinggi. Efisiensi diukur dengan membandingkan output dan input dengan kriteria atau target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Definisi efisiensi terkait erat dengan produksi. Perbandingan sederhana dari output yang dihasilkan dan input yang dikonsumsi dapat digunakan untuk menentukan efisiensi. Ketika suatu produk atau tugas dapat diselesaikan dengan jumlah sumber daya paling sedikit, proses operasi operasional dianggap efisien.

Efisiensi anggaran dalam menghasilkan pelayanan publik merupakan salah satu agenda pemerintah. Oleh sebab itu pengukuran efisiensi didasarkan pada hubungan antara jumlah populasi dan tekanan biaya. Skor efisiensi rendah tidak ditafsirkan sebagai penghematan biaya apabila terjadi penurunan jumlah populasi. Sedangkan inefisiensi menunjukkan kinerja yang dalam pemberian pelayanan publik tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan yang berubah dan ketidakmampuan untuk menyediakan layanan dengan biaya yang murah (Geys *et al.*, 2013).

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tercermin dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan biaya yang harus ditanggung pemerintah untuk melaksanakan suatu kebijakan yang telah ditetapkan untuk pembelian barang dan jasa. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan pengeluaran pemerintah, dan dapat dibagi menjadi teori makro dan teori mikro. Teori evolusi pengeluaran pemerintah berusaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran

dan permintaan barang publik di tingkat mikro. Hubungan antara penawaran dan permintaan barang publik akan menentukan berapa banyak barang publik yang akan disediakan melalui anggaran (Mangkoesoebroto, 2001 dan Azwar, 2016).

Metode Pengukuran Efisiensi Sektor Publik

Situasi di mana tidak lagi praktis untuk mendistribusikan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat digambarkan sebagai evaluasi efisiensi sektor publik, terutama dalam pengeluaran pemerintah. REKD digunakan untuk menilai efisiensi publik dalam penelitian. REKD adalah istilah yang mendefinisikan perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan vs kuantitas pendapatan yang direalisasikan. Jika rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau kurang dari 100 persen, kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan tergolong efisien. Semakin kecil REKD maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menilai secara cermat biaya untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang dipungutnya guna menentukan efisien atau tidaknya upaya pemungutan penerimaan tersebut (Fathah, 2017).

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007, belanja modal adalah belanja anggaran yang digunakan untuk membeli atau menambah aset lain yang memberikan keuntungan lebih dari satu periode akuntansi dan melampaui batasan kapitalisasi minimum untuk aset tetap atau aset lain yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Abdullah (2013), Semacam pengeluaran pemerintah langsung yang dikenal sebagai pengeluaran modal menghasilkan aset tetap sebagai produknya. Pengeluaran modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang menawarkan manfaat selama beberapa periode akuntansi (Erlina, 2013). Harga pembelian/pembangunan aset tetap berwujud adalah jumlah nilai pembelian/pengadaan atau konstruksi yang dianggarkan dalam belanja modal (Permendagri No. 13 Tahun 2006).

Penelitian Ramlan (2009) menggunakan PAD dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel output. Berdasarkan hasil kajian, hanya ada dua pemerintah kabupaten/kota yang bisa mencapai efisiensi ideal 100 persen dan satu pemerintah kabupaten/kota yang mendekati. Sebaliknya, sebagian besar pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur kurang efisien dalam hal kinerja.

Penanaman Modal, menurut Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005, adalah penempatan dana dan/atau barang Pemerintah Pusat dalam jangka panjang untuk penanaman modal dalam pembelian surat-surat berharga dan penyertaan langsung yang dapat mengembalikan nilai pokok ditambah nilai ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lain dalam jangka waktu tertentu. Penganggaran belanja modal yang salah sa-tunya terdiri dari pembangunan infrastruktur ber-dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Radiansyah, 2012 dan Zamzami, 2014). Hal ini menunjukkan kenaikan anggaran pembangunan infrastruktur akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Putra, 2017; Sopyan, 2018; dan Ritonga *et al.*, 2021).

Konsep efisiensi mengindikasikan pemanfaatan yang maksimal terhadap keterbatasan sumber daya yang tersedia. Selain itu pembiayaan belanja modal yang bersumber dari APBN/APBD harus beralih ke alternatif pendanaan yang lain seperti mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Kementerian Keuangan RI, 2022).

3. Data dan Metode

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Di Provinsi Aceh, unit penelitiannya adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2016 hingga 2019 diikutsertakan dalam penelitian ini, dengan jumlah pemerintah daerah sebanyak 23 pemerintah daerah yang terdiri dari 18 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota. Selain itu, 23 kabupaten/kota akan dipantau selama empat kali (2016-2019). Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (LKPD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merupakan satu-satunya sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data penelitian.

Pendekatan DEA (*Data Envelopment Analysis*) dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) digunakan dalam analisis penelitian ini. Keuntungan menggunakan pendekatan DEA ini adalah dapat menerima input dan output dalam jumlah besar dalam perhitungan model program linier, sehingga menghasilkan nilai efisiensi tunggal untuk setiap pengamatan. Pendekatan DEA menetapkan bahwa jika sebuah kota atau kabupaten memiliki nilai maksimum (100 persen atau 1,000), itu dianggap efisien; namun jika nilai kabupaten atau kota kurang dari 100 persen (1,000), maka kota atau kabupaten tersebut tergolong tidak efisien. Rumus yang digunakan untuk menghitung REKD ini adalah:

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efisiensi dari hasil perhitungan rasio efisiensi ini berdasarkan Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan (tabel 1)

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Persentase Keuangan	Kinerja	Kriteria
<60%		Sangat Efisien
60%-80%		Efisien
80%-90%		Cukup Efisien
90%-100%		Kurang Efisien
>100%		Tidak Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 (1996).

4. Hasil

Tingkat efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019 dengan pendekatan DEA menggunakan model CRS dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa perhitungan menggunakan model CRS hanya Kota Subulussalam yang menunjukkan hasil 100% baik dari PAD, investasi maupun pertumbuhan ekonomi

pada tingkat efisien. Sedangkan kota lainnya pada tingkat tidak efisien dengan nilai dibawah 100%.

Selanjutnya untuk melihat tingkat efisiensi Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019 dengan model VRS dapat dilihat pada Tabel 3. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan perhitungan menggunakan model VRS menunjukkan 2 Kabupaten/Kota semua variable outputnya efisien yaitu bernilai 1,000. Satu Kabupaten terdapat 2 *variable output* yang efisien dan 3 Kabupaten/Kota menunjukkan 1 *variable output* yang efisien.

Nilai Efisiensi Belanja Modal Model CRS dan VRS

Berdasarkan Ringkasan Tingkat Efisiensi Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019, diketahui bahwa dengan menggunakan model VRS, unit analisis sedikit mengalami kenaikan efisiensi dibandingkan dengan menggunakan model CRS. Selanjutnya nilai mean menunjukkan rata-rata efisiensi teknis (VRS) sebesar 0,691 yang mendekati angka efisiensi 1. Efisiensi teknis menunjukkan efisiensi unit analisis dalam mengubah faktor produksi input menjadi output. Unit analisis yang bernilai efisiensi satu (1,000) pada metode VRS disebut sebagai *pure technical efficiency* atau efisiensi teknis secara keseluruhan.

Tabel 2. Rangkuman Perhitungan Efisiensi CRS

UKE	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		Investasi		Pertumbuhan Ekonomi	
		Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
1	Kab. Aceh Barat	0,254	Tidak efisien	0,060	Tidak efisien	0,190	Tidak efisien
2	Kab. Aceh Barat Daya	0,562	Tidak efisien	0,581	Tidak efisien	0,486	Tidak efisien
3	Kab. Aceh Besar	0,225	Tidak efisien	0,020	Tidak efisien	0,100	Tidak efisien
4	Kab. Aceh Jaya	0,894	Tidak efisien	0,102	Tidak efisien	0,648	Tidak efisien
5	Kab. Aceh Selatan	0,345	Tidak efisien	0,119	Tidak efisien	0,327	Tidak efisien
6	Kab. Aceh Singkil	0,873	Tidak efisien	0,211	Tidak efisien	0,671	Tidak efisien
7	Kab. Aceh Tamiang	0,365	Tidak efisien	0,037	Tidak efisien	0,222	Tidak efisien
8	Kab. Aceh Tengah	0,391	Tidak efisien	0,118	Tidak efisien	0,332	Tidak efisien
9	Kab. Aceh Tenggara	0,770	Tidak efisien	0,169	Tidak efisien	0,436	Tidak efisien
10	Kab. Aceh Timur	0,477	Tidak efisien	0,130	Tidak efisien	0,177	Tidak efisien
11	Kab. Aceh Utara	0,116	Tidak efisien	0,017	Tidak efisien	0,083	Tidak efisien
12	Kab. Bener Meriah	0,531	Tidak efisien	0,057	Tidak efisien	0,310	Tidak efisien
13	Kab. Bireuen	0,195	Tidak efisien	0,063	Tidak efisien	0,116	Tidak efisien
14	Kab. Gayo Lues	0,999	Tidak efisien	0,154	Tidak efisien	0,729	Tidak efisien
15	Kab. Nagan Raya	0,383	Tidak efisien	0,241	Tidak efisien	0,199	Tidak efisien
16	Kab. Pidie	0,190	Tidak efisien	0,065	Tidak efisien	0,195	Tidak efisien
17	Kab. Pidie Jaya	0,788	Tidak efisien	0,285	Tidak efisien	0,452	Tidak efisien
18	Kab. Simeulue	0,446	Tidak efisien	0,007	Tidak efisien	0,435	Tidak efisien
19	Kota Banda Aceh	0,120	Tidak efisien	0,023	Tidak efisien	0,065	Tidak efisien
20	Kota Langsa	0,291	Tidak efisien	0,154	Tidak efisien	0,293	Tidak efisien
21	Kota Lhokseumawe	0,116	Tidak efisien	0,101	Tidak efisien	0,196	Tidak efisien
22	Kota Sabang	0,438	Tidak efisien	0,060	Tidak efisien	0,615	Tidak efisien
23	Kota Subulussalam	1,000	Efisien	1,000	Efisien	1,000	Efisien

Akan tetapi, unit analisis tersebut belum tentu efisien jika diuji dengan menggunakan model CRS. Selanjutnya, terdapat 1 (satu) unit analisis yaitu Kabupaten Aceh Singkil dengan keterangan *increasing return to scale* (IRS), yang berarti UKE tersebut harus menurunkan jumlah input belanja modal agar mencapai target efisien. Baik belanja

tanah, belanja peralatan dan mesin, maupun belanja modal daerah lainnya. Karena yang terjadi disini adalah proporsi kelebihan input yang menyebabkan ketidakefisienan. Selanjutnya bagi UKE yang memiliki keterangan *decreasing return to scale* (drs), UKE tersebut harus memaksimalkan output dengan baik.

Tabel 3. Rangkuman Perhitungan Efisiensi VRS

UKE	Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah		Investasi		Pertumbuhan Ekonomi	
		Nilai	Ket	Nilai	Ket	Nilai	Ket
1	Kab. Aceh Barat	0,605	Tidak efisien	0,583	Tidak efisien	0,583	Tidak efisien
2	Kab. Aceh Barat Daya	0,889	Tidak efisien	1,000	Efisien	0,906	Tidak efisien
3	Kab. Aceh Besar	0,534	Tidak efisien	0,515	Tidak efisien	0,515	Tidak efisien
4	Kab. Aceh Jaya	0,895	Tidak efisien	0,718	Tidak efisien	0,887	Tidak efisien
5	Kab. Aceh Selatan	0,760	Tidak efisien	0,780	Tidak efisien	0,791	Tidak efisien
6	Kab. Aceh Singkil	1,000	Efisien	0,753	Tidak efisien	0,823	Tidak efisien
7	Kab. Aceh Tamiang	0,751	Tidak efisien	0,679	Tidak efisien	0,679	Tidak efisien
8	Kab. Aceh Tengah	1,000	Efisien	1,000	Efisien	1,000	Efisien
9	Kab. Aceh Tenggara	0,979	Tidak efisien	0,899	Tidak efisien	0,912	Tidak efisien
10	Kab. Aceh Timur	0,853	Tidak efisien	0,818	Tidak efisien	0,734	Tidak efisien
11	Kab. Aceh Utara	0,732	Tidak efisien	0,732	Tidak efisien	0,732	Tidak efisien
12	Kab. Bener Meriah	0,721	Tidak efisien	0,575	Tidak efisien	0,672	Tidak efisien
13	Kab. Bireuen	0,592	Tidak efisien	0,592	Tidak efisien	0,592	Tidak efisien
14	Kab. Gayo Lues	1,000	Efisien	0,867	Tidak efisien	1,000	Efisien
15	Kab. Nagan Raya	0,737	Tidak efisien	0,823	Tidak efisien	0,650	Tidak efisien
16	Kab. Pidie	0,772	Tidak efisien	0,772	Tidak efisien	0,772	Tidak efisien
17	Kab. Pidie Jaya	0,789	Tidak efisien	0,770	Tidak efisien	0,750	Tidak efisien
18	Kab. Simeulue	0,466	Tidak efisien	0,354	Tidak efisien	0,496	Tidak efisien
19	Kota Banda Aceh	0,507	Tidak efisien	0,507	Tidak efisien	0,507	Tidak efisien
20	Kota Langsa	0,624	Tidak efisien	0,695	Tidak efisien	0,661	Tidak efisien
21	Kota Lhokseumawe	0,732	Tidak efisien	0,767	Tidak efisien	0,732	Tidak efisien
22	Kota Sabang	0,450	Tidak efisien	0,380	Tidak efisien	1,000	Efisien
23	Kota Subulussalam	1,000	Efisien	1,000	Efisien	1,000	Efisien

Nilai Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan nilai efisiensi Pendapatan Asli Daerah, menunjukkan bahwa dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh selama periode 2016-2019 dengan metode CRS, hanya 1 Kabupaten/Kota (4,35%) yang memiliki tingkat efisiensi pendapatan asli daerah 100% (1,000), yaitu Kota Subulussalam. Sedangkan sisanya sebanyak 12 Kabupaten/Kota (95,65%) memiliki tingkat inefisiensi pendapatan asli daerah. Selanjutnya untuk model VRS, diketahui bahwa terdapat sebanyak 4 Kabupaten/Kota (17,39%) di Aceh selama periode 2016-2019 yang memiliki tingkat efisiensi pendapatan asli daerah 100% (1,000), yaitu Kab. Aceh Singkil, Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, dan Kota Subulussalam. Sedangkan sisanya sebanyak 19 Kabupaten/Kota (82,61%) memiliki tingkat pendapatan asli daerah tidak efisien hal ini dipengaruhi oleh persentase pendapatan asli daerah berkontribusi relative besar pada anggaran

belanja modal namun realisasi anggaran tersebut tidak maksimal.

Nilai Efisiensi Investasi

Berdasarkan nilai efisiensi investasi, menunjukkan bahwa dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh selama periode 2016-2019 dengan metode CRS, hanya 1 Kabupaten/Kota (4,35%) yang memiliki tingkat efisiensi investasi 100% (1,000), yaitu Kota Subulussalam. Sedangkan sisanya sebanyak 22 Kabupaten/Kota (95,65%) pada tingkat tidak efisien. Selanjutnya untuk model VRS, diketahui bahwa terdapat sebanyak 3 Kabupaten/Kota (13,04%) di Aceh selama periode 2016-2019 yang memiliki tingkat efisiensi investasi 100% (1,000), yaitu Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tengah, dan Kota Subulussalam. Sedangkan sisanya sebanyak 20 Kabupaten/Kota (86,96%) memiliki tingkat investasi tidak efisien.

Nilai Efisiensi Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan nilai efisiensi pertumbuhan ekonomi, menunjukkan bahwa dari 23 Kabupaten/Kota di Aceh selama periode 2016-2019 dengan metode CRS, hanya 1 Kabupaten/Kota (4,35%) yang memiliki tingkat efisiensi pertumbuhan sebesar 100% (1,000), yaitu Kota Subulussalam. Sedangkan sisanya sebanyak 22 Kabupaten/Kota (95,65%) memiliki tingkat inefisiensi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya untuk model VRS, diketahui bahwa terdapat sebanyak 4 Kabupaten/Kota (17,39%) di Aceh selama periode 2016-2019 yang memiliki tingkat efisiensi pertumbuhan ekonomi 100%, yaitu Kab. Aceh Tengah, Kab. Gayo Lues, Kota Lhokseumawe, dan Kota Sabang. Sedangkan sisanya sebanyak 19 Kabupaten/Kota (82,61%) memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tidak efisien.

Nilai Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan nilai rasio Efisiensi Keuangan Daerah tingkat REKD Kabupaten/Kota sesuai Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Tingkat efisiensi belanja modal berbeda di setiap tahunnya. Pada tahun 2016 hampir setengah dari Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh termasuk kategori cukup efisien. Dalam tahun tersebut tidak ada satupun yang masuk ke dalam kategori sangat efisien dalam hal pemanfaatan belanja modal. Terdapat 7 Kabupaten/Kota (lebih dari 30%) termasuk ke dalam kategori pemanfaatan belanja modal kurang efisien.

Tabel 4. Rangkuman Hasil REKD

%	Kategori	2016	2017	2018	2019
<60	Sangat Efisien	0	1	1	1
60-80	Efisien	4	8	11	10
80-90	Cukup Efisien	11	10	6	8
90-100	Kurang efisien	7	4	3	3
>100	Tidak Efisien	1	0	2	1

Peningkatan efisiensi pemanfaatan belanja modal di Kabupaten/Kota mengalami perbaikan semenjak Tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 terdapat 10 Kabupaten/Kota (lebih dari 47%) dengan kategori efisien dalam pemanfaatan belanja modal dan 3 Kabupaten/Kota pada kategori kurang efisien (tabel 4).

Hasil perhitungan tingkat produktivitas belanja modal Kabupaten/Kota di Aceh Periode 2016-

2019 dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa terdapat 3 UKE yang memiliki nilai TFP >1,000 yaitu Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, dan Kota Sabang, hal ini menunjukkan bahwa UKE mengalami peningkatan produktivitas. Selanjutnya terdapat 20 UKE yang memiliki nilai TFP <1,000, hal ini menunjukkan bahwa UKE mengalami penurunan produktivitas. Hasil tabel juga menunjukkan bahwa UKE yang memiliki pertumbuhan TFP tertinggi adalah Kabupaten Aceh Timur dengan nilai 1,116, sedangkan UKE yang memiliki pertumbuhan TFP terendah adalah Kota Lhokseumawe dengan nilai 0,543.

Tabel 5. Rangkuman Perhitungan Efisiensi TFP

Tingkat Produktivitas	Kabupaten/Kota
Efisien (> 1,000)	3
Tidak Efisien (< 1,000)	20

5. Pembahasan

Analisis Tingkat Efisiensi Belanja Modal Secara Teknis Biaya dan Teknis Sistem pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2016-2019

Berdasarkan rangkuman perhitungan efisiensi CRS dan VRS diketahui bahwa masing-masing UKE pada masing-masing variabel memiliki tingkat efisien dan inefisien yang bervariasi jika dilihat pada model yang berbeda. Misalnya seperti Kabupaten Aceh Tengah, selama periode 2016-2019 memiliki tingkat inefisien pada ketiga variabel output (pendapatan asli daerah; investasi; dan pertumbuhan ekonomi) dengan model CRS (0,391; 0,118; dan 0,332), namun jika dilihat dengan model VRS, maka ketiga variabel tersebut dinilai efisien (semua bernilai 1,000).

Sedangkan Kabupaten/Kota yang belum mencapai efisiensi sempurna (1,000), maka diindikasikan besaran input dalam belanja modal belum mencapai output yang optimal. Setiap perhitungan efisiensi diharapkan untuk mencapai output optimal sehingga berdampak pada nilai efisiensi optimal. Selama periode penelitian, penilaian efisiensi dengan model VRS lebih baik dari pada efisiensi CRS. Walaupun hasil penelitian ini membuktikan bahwa masih banyak UKE atau Kabupaten/Kota di Aceh selama tahun 2016-2019 masih belum efisien 100% (<1,000) dalam penggunaan belanja modal untuk peningkatan pendapatan asli daerah, investasi maupun pertumbuhan ekonomi.

Perbedaan perhitungan CRS dan VRS ini - disebabkan pada perhitungan CRS mengasumsikan rasio penambahan *variable input* dan *variable output* adalah sama dan *variable* ini dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan perhitungan VRS mengasumsikan rasio penambahan *variable input* dan *variable output* tidak sama dan pemanfaatan *variable* ini belum maksimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Kristianto & Widodo (2017) yang menunjukkan bahwa Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang telah mencapai tingkat efisiensi 100%, jumlah kabupaten/kota yang belum mencapai tingkat efisiensi 100% masih lebih banyak. Hasil penelitiannya juga menegaskan bahwa status sebagai kota tidak menjadi jaminan memiliki tingkat efisiensi yang baik, artinya kota belum tentu lebih efisien dibandingkan kabupaten.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan temuan Ramlan (2009) yang menunjukkan bahwa hanya dua pemerintah kabupaten/kota yang dapat mencapai efisiensi semaksimal mungkin dan satu pemerintah kabupaten/kota mendekati. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur cenderung melakukan eksekusi dengan kurang efisien. Hal ini terjadi akibat PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah standar, tergantung dari belanja modal yang dikeluarkan.

Selanjutnya hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Wang & Alvi (2011), yang menyatakan bahwa ketidakefisienan pengeluaran pemerintah menurun ketika terjadinya peningkatan kegiatan ekonomi swasta, khususnya peningkatan konsumsi, investasi dan kegiatan ekspor. Hasil selanjutnya mengemukakan bahwa terjadinya ekspansi moneter dapat memperburuk ketidakefisienan pemerintah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Efisiensi Belanja Modal Berdasarkan Analisis DEA dengan REKD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019

Berdasarkan nilai efisiensi Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019 dengan Metode DEA dan REKD diketahui bahwa tingkat pengukuran nilai efisiensi Kabupaten/Kota di Aceh selama tahun 2016-2019 lebih baik menggunakan penghitungan REKD. Hal itu dapat dilihat dari nilai rata-rata (mean) masing-masing metode, untuk metode DEA dengan model CRS menunjukkan nilai rata-rata sebesar 0,603, angka ini bermakna bahwa belanja modal Kabu-

paten/Kota di Aceh selama rentang tahun 2016-2019 dinilai tidak efisien. Selanjutnya untuk metode DEA dengan model VRS juga menunjukkan hasil yang sama, dimana nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 0,691, angka ini bermakna bahwa bahwa belanja modal Kabupaten/Kota di Aceh selama rentang tahun 2016-2019 dinilai tidak efisien.

Hasil berbeda diperoleh dengan menggunakan metode penghitungan REKD, dimana nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 82,65%, Bagan ini menunjukkan bahwa belanja daerah di kabupaten dan kota Aceh sangat efisien dari tahun 2016 hingga 2019. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten/kota dinilai telah melakukan pemotongan biaya dan memenuhi target dengan baik, yang dibuktikan dengan pencapaian melebihi target anggaran. Hasil ini juga menunjukkan bahwa secara rata-rata Kabupaten/Kota telah berhasil mengumpulkan pendapatan dengan tetap mengeluarkan biaya.

Perbedaan hasil perhitungan dengan DEA dan REKD disebabkan selain pendekatan *variable* yang digunakan dalam perhitungan berbeda juga pada kategori efisien yang berbeda dimana pada perhitungan DEA hanya terdapat 2 (dua) kategori yaitu efisien dan tidak efisien sedangkan pada perhitungan REKD kategori efisien berjenjang dari sangat efisien sampai dengan tidak efisien, sehingga untuk instansi pemerintah lebih baik menggunakan pendekatan REKD.

Efisiensi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan output sambil mempertahankan tingkat input yang sama, meningkatkan output dengan persentase yang lebih besar daripada proporsi peningkatan input, mengurangi input sambil mempertahankan tingkat output yang sama, atau mengurangi input dengan persentase yang lebih besar dari proporsi penurunan output (Mardiasmo, 2009).

Hasil penelitian ini mendukung pernyataan Ramlan (2009) bahwa sebagian besar pemerintahan kabupaten/kota di Jawa Timur bekerja tidak efektif. Hal ini terjadi karena PAD Pemerintah Kabupaten/Kota di bawah standar terkait dengan belanja modal yang dikeluarkan.

Tingkat Produktivitas Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Periode 2016-2019

Tingkat produktivitas belanja modal Kabupaten/Kota di Aceh Periode 2016-2019 menunjukkan terdapat 3 UKE yang memiliki nilai TFP >1,000 yaitu Kab. Aceh Besar, Kab. Aceh Timur, dan Kota Sabang, hal ini menunjukkan bahwa UKE menga-

lami peningkatan produktivitas. Selanjutnya terdapat 20 UKE yang memiliki nilai TFP <1,000, hal ini menunjukkan bahwa UKE mengalami penurunan produktivitas. Hasil tabel juga menunjukkan bahwa UKE yang memiliki pertumbuhan TFP tertinggi adalah Kabupaten Aceh Timur dengan nilai 1,116, sedangkan UKE yang memiliki pertumbuhan TFP terendah adalah Kota Lhokseumawe dengan nilai 0,543.

Hal ini bermakna bahwa Kabupaten Aceh Timur sangat optimal dalam menggunakan variabel input (belanja modal) dalam meningkatkan produktivitas variabel output (pendapatan asli daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi). Artinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Timur telah berhasil dalam mengelola pengeluaran daerahnya untuk memperoleh pendapatan daerah, melakukan investasi hingga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh dapat dilihat dari salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yaitu tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Aceh (BPS) diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Timur selama tahun 2016-2019 cenderung mengalami penurunan (tahun 2016 sebesar 15,06%; tahun 2017 sebesar 15,25%; tahun 2018 sebesar 14,49%; dan tahun 2019 sebesar 14,47%). Hal ini mengindikasikan bahwa dengan membaiknya struktur ekonomi daerah, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menurun.

Sedangkan Kota Lhokseumawe dinilai masih rendah dalam meningkatkan produktivitas, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah dalam mengoptimalkan variabel input. Hal ini sejalan dengan review laporan keuangan daerah Kota Lhokseumawe tahun 2016 hingga tahun 2019, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe masih diprioritaskan untuk belanja operasional sehingga mengakibatkan rasio belanja modal yang rendah. Rata-rata rasio biaya operasional yang masih tinggi jika dibandingkan dengan rasio rata-rata belanja modal menunjukkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Lhokseumawe lebih mementingkan pengeluaran rutin untuk menjalankan fungsi pemerintahan, daripada pertumbuhan daerah.

Hal tersebut juga sesuai dengan data BPS yang menunjukkan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara mengalami peningkatan ber-

turut-turut selama tahun 2016-2019. Dimana jumlah penduduk miskin tahun 2016 sebesar 301.733 ribu jiwa, tahun 2017 sebesar 317.729 ribu jiwa, tahun 2018 sebesar 340.086 ribu jiwa dan tahun 2019 meningkat sebesar 353.856 ribu jiwa.

Pada sektor publik, organisasi yang melakukan aktifitas pengeluaran ataupun penerimaan saat proses penganggaran akan dipengaruhi oleh kepentingan politik didalamnya. Maka dari itu, segala proses yang menyangkut kepentingan publik harus dikelola dengan baik agar sumber daya menjadi efisien. Walaupun demikian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan keuangan daerah yang menyebutkan setiap unit kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di lingkungan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan jasa layanan publik berupa barang dan jasa kepada masyarakat, dalam proses penyediaan tersebut harus berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.

6. Simpulan dan Saran

Simpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan setelah dilakukan analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh periode 2016-2019 bervariasi dengan menggunakan metode DEA. Tingkat pengukuran nilai efisiensi belanja modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh selama periode 2016-2019 lebih baik menggunakan penghitungan REKD dibandingkan menggunakan metode DEA.

Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu (1) objek penelitian ini hanya dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, sehingga tidak dapat digeneralisasikan kepada daerah lain diluar objek penelitian ini, (2) penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota dalam menganalisis hasil penelitian, sehingga dirasa belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan, (3) variabel output dalam penelitian ini menggunakan pendapatan asli daerah, investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi input.

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, harus meningkatkan kualitas pengelolaan belanja daerah khususnya belanja modal, hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada program-program yang menjadi prioritas Pemerintah daerah sehingga target untuk kepentingan publik dapat terwujud. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian agar didapat hasil penelitian yang lebih luas. Peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menggunakan metode interview kepada aparatur desa, sehingga didapat gambaran lebih jelas dan rinci antara hasil yang diperoleh dari laporan keuangan dengan keadaan yang sebenarnya di daerah.

Daftar Pustaka.

- Abdullah, S. (2013). *Defisit/Surplus dan SILPA dalam Anggaran Daerah ~ Apakah Saling Berhubungan?* Wordpress.
- Alonso, J. M., & Andrews, R. (2018). Fiscal decentralisation and local government efficiency : Does relative deprivation matter? *Environment and Planning C: Politics and Space*, 0(0), 1-22. <https://doi.org/10.1177/-2399654418784947>
- Andriani, M. D. N. P., & Setyowati, E. (2019). Perencanaan Core Capability Pegawai Dalam Rangka Menghadapi Era Kompetitif (Studi di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 5(1), 17-24.
- Araujo, M. De, Wiagustini, N. L. P., & Purbawangsa, I. B. A. (2018). Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 12, 2535. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i12.p04>
- Arsa, I. K., & Setiawina, N. D. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan pada Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 s.d. 2013. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104-112.
- Azwar, A. (2016). Peran Alokatif Pemerintah Peran Alokatif Pemerintah melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 20(2), 149-167. <https://doi.org/10.31685/kek.v20i2.186>
- Bappenas. (2011). *Kajian Kualitas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*.
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-73.
- BPK RI. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Erlina, R. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Brama Ardian.
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 2(1), 37-44.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *EBBANK*, 8(1), 33-48.
- Febrianty, P., Studi, P., Akuntansi, D.-4, Pemerintahan, M., & Bandung, P. N. (2021). Indonesian Accounting Research Journal Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Langsung Analysis Of The Effectiveness And Efficiency Of The Direct Expenditure Budget (Case Study On Bandung City Social Service) Ira Novianty Etti Ernita Sembiring. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 74-82.
- Firsawan, A. H. (2018). *Semester I/2018, Penyerapan Belanja Negara di Aceh 43,4%*. SUMATRA.
- Geys, B., Heinemann, F., & Kalb, A. (2013). Local Government Efficiency in German Municipalities. *Raumforsch Raumordn*, 71, 283-293. <https://doi.org/10.1007/s13147-012-0191-x>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi Revi)*. Salemba Empat.
- Haryanto, S. (2013). Analisis Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 9(2), 140-159. <https://doi.org/10.21067/jem.v9i2.203>
- Indriati, N. E. (2014). Analisis Efisiensi Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Bidang Pendidikan dan Kesehatan). *Jesp*, 6(2), 192-205.
- Juanda, B., Handra, H., Auracher, T., Sitepu, B., & Marthaleta, N. (2013). *Penyusunan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembiayaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)*. DJPK Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar Menteri Keuangan*.

- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Efisiensi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (n.d.). *SAKIP RB AWARD 2020 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*. Streamed Live on Apr 22, 2021.
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2017). Analisis Efisiensi Belanja Langsung Dan Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota Di Jawa Timur Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 17(1), 1-12.
- Lantu, C., Lambey, L., & Anneke, W. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Emba*, 5(2), 1260-1270.
- Mangkoesebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, S. M. (2020). Analisis Efisiensi Belanja Negara Periode 2014-2016 Di Pstnt-Batan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 1-7.
- Pemerintah Pusat. (2004). *Undang-undang (UU) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (p. Nomor 33)*. BPK RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG: 6 HLM, September, 1-2*.
- Putra, W. (2017). Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(2), 120. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i2.22987>
- Putra, Y. S., Juanda, B., & Sarma, M. (2018). Strategi Peningkatan Kualitas Belanja Daerah Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(Nomor Khusus), 1-13.
- Radiansyah, D. (2012). *Analisis Kontribusi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia (Periode Tahun 1996s.d 2008)*
- Ramlan, M. (2009). *Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berbasis Data Envelopment Analysis (DEA)*. Muhammadiyah Malang University.
- Rasyidi, M. A. (2019). *Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Dalam Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Strategis Nasional*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ritonga, A., Handra, H., & Andrianus, F. (2021). Pengaruh dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Sumatera Barat. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 277. <https://doi.org/10.20961/region.v16i2.32968>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2003). *Ilmu Mikroekonomi*. Media Global Edukasi.
- Sari, N. D., Mintarti, S., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. *Kinerja: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 15(1), 38-43. <https://doi.org/ISSN Online: 2528-1127>
- Sekiguchi, S. (2019). An Analysis of the Efficiency of Local Government Expenditure and the Minimum Efficient Scale in Vietnam. *Urban Science*, 3(3), 77. <https://doi.org/10.3390/urbansci3030077>
- Sofi, I. (2020). *Pemenuhan Anggaran Infrastruktur Di Daerah dan Tantangannya*. Kementerian Keuangan RI.
- Sopyan, H. Y. A. (2018). *Analisis Pengaruh Infrastruktur Jalan, Listrik, dan Air terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di 34 Provinsi Indonesia*.
- Vidoli, F., & Fusco, E. (2018). Level of services, spatial dependence and allocative efficiency in local governments. *Local Government Studies*, 44(6), 848-873. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1512491>
- Wang, E. C., & Alvi, E. (2011). Relative Efficiency of Government Spending and Its Determinants: Evidence from East Asian Countries. In *Eurasian Economic Review volume 1* (pp. 3-28). Springer Link. <https://doi.org/10.14208/BF03353822>
- Warsilan, & Noor, A. (2015). Peranan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda. *Mimbar*, 31(2), 359-366.
- Wiguna, R. U., & Sugiharti, R. R. (2019). Efisiensi Pengeluaran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Industri Kabupaten Cilacap. *Indicators: Journal of Economic and Business*, 1(2), 168-178. <https://doi.org/10.47729/indicators.v1i2.40>
- Zamzami, F. (2014). *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2008 - 2012*. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro*, 1-60.